



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

**SAMBUTAN MENTERI KESEHATAN
PADA ACARA RAPAT KERJA KESEHATAN
PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016**

YTH. Gubernur Sulawesi Tenggara;
YTH. Para Bupati/Walikota Se Sulawesi Tenggara;
YTH. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prop.Sulawesi Tenggara;
YTH. Para Kepala SKPD Pemda Prop. Sulawesi Tenggara;
YTH. Para Kepala Dinas Kesehatan Se Sulawesi Tenggara
YTH. Para Direktur Rumah Sakit Se Sulawesi Tenggara
YTH. Para Undangan dan Hadirin Sekalian Yang Berbahagia.

Assallamu Allaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Mengawali sambutan ini saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul disini melaksanakan rapat kerja kesehatan provinsi sulawesi tenggara.

Pertama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada gubernur dan jajarannya terutama dinas kesehatan provinsi yang telah melaksanakan pertemuan ini melalui suatu rangkaian kegiatan persiapan yang matang. melalui rapat kerja kesehatan seperti ini saya mengharapkan akan diperoleh suatu kesamaan persepsi

antara pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan di provinsi sulawesi tenggara sehingga tujuan pembangunan kesehatan dapat terwujud

Saudara Gubernur Sulawesi Tenggara Dan Hadirin Yang Berbahagia,

Agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah “mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang makin mantap”. pengertian dasarnya adalah, setiap orang mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan, ditempat pelayanan kesehatan yang terstandar, dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, menggunakan standar pelayanan, dengan biaya yang terjangkau serta mendapatkan informasi yang adekuat atas kebutuhan pelayanan kesehatannya.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebersamaan pemahaman semua pemangku kepentingan, komitmen yang kuat, dan kepemimpinan yang konsisten, baik di tingkat nasional maupun di daerah. karena sesungguhnya pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya dapat terwujud.

Ditengah meningkatnya penyebaran fasilitas pelayanan kesehatan dan bertambahnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan di semua jenjang fasilitas pelayanan kesehatan serta distribusi obat yang terus diperbaiki; kita masih terus menghadapi tantangan pembangunan kesehatan seperti tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi gizi kurang dan stunting, beberapa penyakit menular dan penyakit tidak menular tertentu. disamping itu beberapa faktor determinan sosial juga belum dapat kita selesaikan semuanya seperti penyediaan air bersih, sanitasi rumah tangga,

ketahanan pangan, akses informasi dan pendidikan khususnya bagi perempuan, perilaku masyarakat terkait merokok, pola makan, dan pola konsumsi.

Desentralisasi dan otonomi daerah serta demokratisasi yang telah kita pilih sebagai pola penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan daerah mempunyai peran besar dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi yang memungkinkan daerah melakukan inovasi dan mendorong peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pencapaian standar pelayanan yang disyaratkan dalam penyelenggaraan di era desentralisasi dan otonomi daerah.

Saudara Gubernur Sulawesi Tenggara Dan Hadirin Yang Berbahagia

Kita baru saja melaksanakan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Rakerkesnas merupakan forum tertinggi sosialisasi, pembahasan dan perumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan merumuskan resolusi/keepakatan antara pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu resolusi Rakerkesnas Tahun 2016 adalah penguatan Fasyankes Pelayanan Primer yang dilakukan melalui pemenuhan infrastruktur yang memenuhi standar, diutamakan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif serta membangun sistem informasi keluarga dan memenuhi SDM yang terakreditasi sesuai dengan standar Permenkes Nomor 75 Tahun 2014. Penguatan Akreditasi Fasyankes dilakukan dengan membangun komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan akreditasi fasyankes. Dalam pelaksanaan akreditasi fasyankes, dilakukan pemenuhan SDM yang

melakukan akreditasi RS dan Puskesmas serta pemenuhan ketersediaan dan kesinambungan dana akreditasi.

Dalam peningkatan anggaran pusat dan daerah, Pemerintah pusat melakukan pengalokasian anggaran kesehatan melalui APBN sektor kesehatan sebesar 5%. Pemerintah daerah meningkatkan alokasi APBD kesehatan provinsi/kabupaten/kota 10% di luar gaji. Pemerintah daerah mendayagunakan *corporate social responsibility* (CSR), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Pajak Rokok. Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran kesehatan terutama pada kegiatan promotif dan preventif melalui pengalokasian APBN dan APBD dalam jumlah yang memadai. Pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi antara usulan dan realisasi pelaksanaan DAK. Dalam pemanfaatan anggaran kesehatan, pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan anggaran kesehatan melalui APBN, APBD, DAK non fisik, BOK, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Pajak Rokok, dan Dana Desa untuk kegiatan promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga sehat secara efektif dan efisien. Optimalisasi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk turut mendukung kegiatan promotif dan preventif.

Dalam upaya mengatasi jumlah dan distribusi nakes yang tidak merata, pemerintah daerah melakukan pemetaan SDM kesehatan dengan menggunakan Sistem Informasi SDM Kesehatan dan menyusun perencanaan kebutuhan dengan merujuk pada Permenkes Nomor 33/2015. Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengatasi maldistribusi di daerahnya dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota, dan memperkuat koordinasi dengan BKD dalam penempatan tenaga kesehatan. Pemda Kab/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengajukan kebutuhan formasi CPNS ke MENPAN dan alokasinya didukung oleh alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2017.

Selain upaya pemerataan, juga dilakukan upaya pemenuhan jenis nakes sesuai dengan standar melalui Pemda Provinsi dan Kab/Kota dapat memanfaatkan Perpres Wajib Kerja Dokter Spesialis (rancangan) untuk mendistribusikan Dokter Spesialis dengan menyusun rencana kebutuhan dan lokasi RS serta menyiapkan dukungan berupa insentif daerah dan ketersediaan alat kesehatan. Pemda Kab/Kota dapat memanfaatkan dana BOK untuk merekrut tenaga kontrak (sesuai Undang-Undang ASN) promosi kesehatan di setiap Puskesmas dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan (tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Gizi, TehnikKefarmasian dan Analisis Laboratorium).

Pemda Provinsi dan Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan (beasiswa) dan pelatihan. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi untuk mendukung upaya tersebut. Pemda Provinsi mengalokasikan anggaran bagi Bapelkes Daerah untuk pengembangan dan pemenuhan tenaga Widyaiswara.

Saudara Gubernur Sulawesi Tenggara Dan Hadirin Yang Berbahagia

Sebelum mengakhiri sambutan saya, perkenankan saya mengajak semua yang mengikuti rangkaian kegiatan rakerkesda ini untuk bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yang sedang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat indonesia. saya percaya apabila sungguh sungguh melakukannya kita akan mampu mencapai yang lebih baik dalam lima tahun kedepan.

Dengan mengucapkan Bismillahirohmannirohim, Rakerkesda Sulawesi Tenggara Saya buka dengan resmi.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa agar berkenan memberikan bimbingan dan meridhoi semua usaha luhur yang kita lakukan.

Terimakasih

Wassalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh

a.n. Menteri Kesehatan
Kepala Badan PPSDM Kesehatan

Usman Sumantri